

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Siaran Pers Nomor: 18/HUMAS PMK/I/2020

Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos Sepadan dengan Data Dukcapil

*Bersama Mensos, Serahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Surakarta

Surakarta (29/1) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (29/1).

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK turut memastikan penyaluran bansos tepat jumlah dan sasaran, yakni diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sepadan dengan data NIK pada data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pusat.

Mengingat, NIK memegang peran kunci untuk memastikan keberadaan KPM sekaligus sebagai pengontrol agar pemberian bansos tidak tumpang tindih.

Sejurus dengan itu, Mensos Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma mengungkap ada beberapa temuan masalah terkait sinkronisasi data yang belum sesuai antara data penerima bansos dengan data Dukcapil.

"Ini kan rawan. Karena itu kita minta daerah untuk membetulkan. Di minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu. Karena kalau tidak padan kita kan juga takut. Orangnya itu ada atau nggak kan kita nggak tahu," ujarnya usai penyerahan bantuan sosial tunai (BST) secara simbolis bersama Menko PMK di Kantor Kelurahan Jebres.

Risma juga menyebut sejumlah daerah telah melaporkan data penerima bansos yang sesuai dengan data Dukcapil. Namun saat ini, masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data.

"Kurang lebih ada 40 daerah yang kita surati untuk dia memadankan dengan data kependudukan. Tambahannya sekitar 600 ribuan seluruh Indonesia, kecuali yang 40 daerah itu belum," jelasnya.

Lebih lanjut, Menko PMK bersama Mensos langsung menyaksikan penyaluran Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di e-Warong KUBe Gulon Sejahtera, Kelurahan Jebres, sambil berdialog dengan beberapa orang penerima manfaat.

Sebagaimana diketahui, Kota Surakarta memiliki jumlah keluarga sebanyak 193 ribu. Dari total jumlah tersebut, 47,27% nya atau sejumlah 91 ribu keluarga telah menerima bansos berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (*)
